

TNI dan POLRI

Oleh: Muradi

Aksi penyerangan dan pengrusakan Polres Ogan Komering Ulu (OKU) oleh puluhan anggota TNI Armed Tarik Martapura minggu lalu menjadi satu dari sekian penegasan bahwa masih ada masalah antara TNI dan Polri pasca pemisahan. Situasi tersebut terkesan aneh apabila mengacu pada pengalaman di sejumlah negara terkait pemisahan polisi dari militer. Empat belas tahun pasca pemisahan TNI dan Polri, tentu bukan waktu yang sebentar untuk memperkuat masing-masing institusi. Beltran (2009) menegaskan bahwa apabila setelah satu dekade pemisahan polisi dari militer, polisi tidak beranjak mandiri dan profesional, maka peluang untuk menyatukan kembali dengan militer akan makin terbuka peluangnya. Indikator mengarah kepada hal tersebut satu persatu terus mempertegas apa yang diungkap oleh Beltran tersebut, setidaknya apabila dilihat pada hubungan antara Polri dengan TNI tidak beranjak baik bahkan setelah empat belas tahun berpisah.

Banyak media memberitakan bahwa masalah utama dari bentrok TNI-Polri ada pada akses ekonomi dan kesejahteraan anggota Polri jauh lebih baik, berbanding terbalik dengan saat Polri masih menjadi bagian dari ABRI. Namun dalam pengamatan penulis, permasalahan antara TNI dan Polri telah beranjak dari sekedar akses ekonomi dan tingkat kesenjangan kesejahteraan kedua institusi keamanan tersebut. Aksi penyerangan dan pengrusakan Polres OKU tersebut merupakan bentuk kemarahan atas sikap semena-mena dan tidak peduli dari oknum Polri pada penanganan kasus tewasnya anggota TNI. Dengan kata lain, masalah kecemburuan atas akses ekonomi dan tingkat kesejahteraan anggota Polri tidak lagi menjadi masalah utama bentrok TNI-Polri, tapi bentuk respek dan menghormati antar sesama institusi keamananlah yang kini yang menjadi permasalahan utama ketidakharmonisan antara TNI-Polri dalam dua tahun terakhir. Setidaknya ukurannya ada pada konsern negara untuk memberikan remunerasi dan sejumlah bentuk penghargaan lain pada sejumlah institusi negara termasuk TNI dan Polri.

Pergeseran akar masalah terkait dengan bentrok TNI-Polri menjadikan pola hubungan antar kedua institusi tersebut makin rumit. Dibutuhkan pendekatan pihak ketiga agar pola hubungan antara TNI dan Polri, khususnya di daerah dapat harmonis. Selama ini, pola hubungan yang terbangun cenderung formal dan membuka ruang bagi terjadinya kompetisi yang tidak sehat berdasarkan pada arogansi dan sikap semena-mena masing-masing institusi. Dan hal tersebut ditunjukkan dan menjadi pemicu penyerangan anggota TNI Armed ke Polres OKU.

Dibutuhkan upaya yang lebih terintegrasi agar bentrok TNI-Polri di masa yang akan datang tidak lagi menjadi permasalahan dan mengganggu hubungan kedua institusi keamanan tersebut pasca pemisahan. Ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemangku kepentingan terkait upaya

meminimalisir bentrok TNI-Polri, yakni: Pertama, perlunya mengupayakan kerja sama yang bersifat terintegrasi dalam memastikan terbangunnya hubungan yang harmonis antara TNI dan Polri. dalam konteks ini, pimpinan Polri dan TNI di semua tingkatan harus secara penuh mendorong langkah tersebut dengan berkonsekuensi menanggalkan sedikit ego sektoral. Langkah ini khususnya dititiktekan pada sejumlah wilayah yang ada markas Brimob ataupun batalyon tempur militer. Dalam pengamatan penulis, bentrokan antara TNI-Polri hampir selalu terjadi di daerah di mana keberadaan markas Brimob dan batalyon militer tempur non-teritorial berada.

Kedua, memosisikan Pemda sebagai pemangku kepentingan di wilayahnya. Selama ini keberadaan dan eksistensi Pemda selalu tidak nampak saat bentrok TNI-Polri terjadi. Seolah-olah permasalahan antara TNI-Polri di luar kewenangannya. Padahal, sebagai kepala daerah, gubernur atau bupati dan walikota merupakan kepala daerah yang bertanggung jawab atas wilayahnya di mana TNI dan Polri juga bertugas. Kealpaan kepala daerah dalam mengharmonisasikan hubungan antara TNI-Polri inilah menyebabkan bentrok TNI-Polri seolah-olah bukan menjadi domain dari Pemda, meski hal tersebut terjadi di wilayahnya. Dalam pengamatan penulis, kepala daerah yang memiliki hubungan baik dengan pimpinan Polri dan TNI di daerahnya memberikan stimulasi yang baik bagi harmonisasi hubungan antara TNI dan Polri.

Ketiga, pimpinan Polri dan TNI, khususnya di daerah dapat memberikan stimulasi atas hubungan yang saling menghormati antar institusi keamanan. Salah satunya dengan mengupayakan sikap respek dan tidak arogan yang memancing kemarahan dan sikap bermusuhan. Hal ini menjadi penting agar permasalahan bentrok TNI-Polri setidaknya makin berkurang dan pada akhirnya tidak terjadi lagi. Salah satu ruang terbangunnya hubungan baik antara TNI-Polri adalah bersama-sama menjalankan fungsinya dalam penanganan konflik yang merupakan amanat dari UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), di mana TNI dilibatkan dalam penanganan konflik sosial tersebut.

Dengan tiga hal tersebut di atas, setidaknya memberikan stimulasi bagi penataan hubungan yang baik antara TNI dan Polri, dan sekaligus mengikis ketakutan akan kemungkinan disatukannya kembali Polri dan TNI, sebagaimana uraian Beltran (2009) di awal tulisan ini. Apalagi pewacanaan penyatuan kembali tersebut juga kerap disuarakan oleh sejumlah pihak, sesuatu yang dalam pandangan penulis sebagai langkah mundur bagi penataan kelembagaan institusi keamanan yang selama ini sudah sangat baik.